



STRATEGI PENINGKATAN DIPLOMASI PERTAHANAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN STABILITAS ASEAN

Mochamad Andri Wahyu Sudrajat¹, Dwi Hartono², Tasdik Mustika Alam³

^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

* Andri.Wahyu@gmail.com

Korespondensi penulis: andri_wahyu@gmail.com

Abstract. Defense diplomacy relations between Indonesia and Malaysia have a long history, yet they continue to face implementation challenges, particularly concerning traditional and non-traditional issues. As two founding members of ASEAN, Indonesia and Malaysia play a crucial role in fostering ASEAN stability, exemplified by their handling of issues in the South China Sea. This research aims to deeply examine the challenges and opportunities Indonesia and Malaysia face in enhancing their bilateral defense diplomacy. The research method employed in this thesis is descriptive analysis, utilizing a literature review, observation, and interviews to obtain data validity and suitability, with analysis conducted using the Miles and Huberman technique. The findings indicate that despite various challenges, such as differing foreign policies and sometimes conflicting national interests, significant opportunities also exist, including a shared vision for maintaining regional stability and protecting natural resources. Therefore, a strategy to enhance Indonesia-Malaysia defense diplomacy is needed to realize ASEAN stability, especially to support security in the South China Sea. To achieve this, the researcher proposes a strategy to enhance Indonesia-Malaysia defense diplomacy focusing on six key areas: strengthening institutional coordination, increasing trust, developing intelligence data exchange, enhancing strategic dialogue, adopting a holistic and inclusive approach, and reinforcing ASEAN's position as a collective actor. With a proactive and integrative approach, this bilateral relationship will not only contribute to regional security and peace but also strengthen ASEAN's position in confronting various emerging threats in an increasingly complex era of globalization.

Keywords: Defense Diplomacy, ASEAN, Regional Stability, South China Sea

Abstrak. Hubungan diplomasi pertahanan Indonesia dan Malaysia sudah lama berjalan, namun tetap memiliki permasalahan dalam pelaksanaannya terutama terkait dengan permasalahan tradisional dan non-tradisional. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara pendiri ASEAN memiliki peran penting dalam mendorong stabilitas ASEAN contoh kasus dalam menangani permasalahan di Laut China Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam meningkatkan diplomasi pertahanan kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis, dengan pendekatan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara untuk memperoleh validitas dan kesesuaian data menggunakan teknik analisa Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti perbedaan kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional yang kadang-kadang bertentangan, terdapat pula peluang signifikan, termasuk kesamaan visi dalam menjaga stabilitas regional dan perlindungan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia dalam rangka mewujudkan stabilitas ASEAN terutama untuk mendukung keamanan di Laut China Selatan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka peneliti menawarkan strategi peningkatan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia yang dititikberatkan pada enam hal, yaitu: penguatan koordinasi institusional, peningkatan kepercayaan, pengembangan pertukaran data intelijen, peningkatan dialog strategis, pendekatan holistik dan inklusif, serta penguatan posisi ASEAN sebagai aktor kolektif. Dengan pendekatan proaktif dan integratif, diharapkan hubungan bilateral ini tidak hanya dapat berkontribusi pada keamanan dan perdamaian di kawasan, tetapi juga memperkuat posisi ASEAN dalam menghadapi berbagai ancaman yang muncul di era globalisasi yang semakin kompleks.

Kata kunci: Diplomasi Pertahanan, ASEAN, Stabilitas Regional, Laut China Selatan



1. LATAR BELAKANG

Pembentukan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 1967 dilatarbelakangi oleh keinginan negara-negara di Asia Tenggara untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan yang saat itu dilanda ketegangan geopolitik, terutama akibat Perang Dingin dan konflik internal di beberapa negara anggota. Dengan semangat kerja sama regional, lima negara pendiri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok. Tujuan utama ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan, serta mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui penghormatan terhadap keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antarnegara. Organisasi ini juga berfungsi sebagai forum dialog dan konsultasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai, serta meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, dan administrasi.

Meskipun ASEAN telah mencapai banyak kemajuan dalam mempromosikan integrasi regional dan stabilitas, organisasi ini masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan pembangunan ekonomi yang signifikan antarnegara anggota, yang dapat menghambat upaya integrasi ekonomi yang lebih dalam. Selain itu, isu-isu transnasional seperti perubahan iklim, kejahatan lintas batas (termasuk perdagangan manusia dan narkoba), serta sengketa Laut Cina Selatan terus menjadi sumber ketegangan dan memerlukan respons kolektif yang kuat. ASEAN juga sering dikritik karena prinsip non-intervensi yang ketat, yang terkadang membatasi kemampuannya untuk secara efektif mengatasi krisis hak asasi manusia atau konflik internal di negara-negara anggota, seperti yang terjadi di Myanmar.

Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara dengan garis pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Hubungan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia telah terjalin sejak diratifikasinya Security Arrangement Tahun 1972 oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur (Yahaya & Yazid, 2020; Aziz & Yazid, 2022). Berangkat dari Security Arrangement 1972 tersebut, dibentuklah General Border Committee (GBC) Malindo pada tahun yang sama (Yahaya & Yazid, 2020). GBC Malindo berfungsi sebagai forum kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang didirikan untuk mengelola dan menjaga perbatasan kedua negara (Aziz & Yazid, 2022). Forum ini berperan dalam berbagai aspek kerja sama, termasuk keamanan perbatasan, sosial ekonomi, dan pengelolaan perbatasan secara umum (Yahaya & Yazid, 2020). Implementasi dari GBC ini mencakup berbagai kegiatan seperti Operasi Pengawasan (Opwas) perbatasan darat, Patroli Koordinasi (Patkor) Malindo, Patroli Eye in The Sky (EiS) antara TNI AU dan TUDM (Tentera Udara Diraja Malaysia), Patkor Malindo Optima, Latihan Bersama (Latma) antara TNI dan TDM, serta pertukaran data intelijen (Yahaya & Yazid, 2020; Ichsan & Adhitya, 2021).

Meskipun hubungan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia sampai saat ini berjalan harmonis namun Indonesia-Malaysia memiliki tantangan dalam peningkatan diplomasi pertahanan. Tantangan yang dihadapi dalam hubungan diplomasi Indonesia – Malaysia antara lain belum selesainya permasalahan batas maritim maupun batas darat, sering terjadinya klaim warisan budaya antar negara, permasalahan pekerja migran, human trafficking, armed robbery



at sea, pelanggaran wilayah dan transnational crime lainnya yang terjadi di wilayah perbatasan. Tantangan ini memerlukan kerjasama dan Confident Building Measures (CBM) antar kedua negara agar tidak meningkat menjadi konflik dua negara. Permasalahan batas maritim antara Indonesia-Malaysia yang belum selesai terbagi atas 5 (lima) segmen, yaitu segmen Selat Malaka Bagian Barat, Segmen Selat Malaka Bagian Selatan, Segmen Selat Singapura Bagian Timur, Segmen Laut China Selatan dan Segmen Laut Sulawesi. Batas Maritim yang sudah disepakati dan dalam proses negosiasi oleh kedua negara, antara lain:

Tabel 1.2 Segmen Permasalahan Batas Maritim Indonesia-Malaysia

NO	SEGMEN	LAUT TERITORIAL	LANDAS KONTINEN	ZONA EKONOMI EKSLUSIF
1	Selat Malaka	Sudah Disepakati (Tahun 1971)	Sudah Disepakati (Tahun 1969)	Dalam Proses Perundingan
2	Selat Malaka Bagian Selatan	Sudah Disepakati (Tahun 2023) Menunggu Ratifikasi	Sudah Disepakati (Tahun 1969)	Tidak Ada
3	Selat Singapura Bagian Timur	Dalam Proses Negosiasi	Sudah Disepakati (Tahun 1969)	Tidak Ada
4	Laut China Selatan	Dalam Proses Negosiasi (Perairan Tg. Datu)	Sudah Disepakati (Tahun 1969)	Dalam Proses Negosiasi
5	Laut Sulawesi	Dalam Proses Negosiasi (Intertidal Perairan Sebatik)	Dalam Proses Negosiasi	Dalam Proses Negosiasi

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Selain permasalahan batas maritim, Indonesia -Malaysia juga memiliki permasalahan dalam batas darat yang berada di wilayah Pulau Kalimantan. Terdapat 9 Outstanding Boundary Problem (OBP) yang berada di perbatasan darat Indonesia-Malaysia, dimana 4 OBP berada di sektor Barat dan 5 OBP berada di wilayah Timur. Dari 9 OBP tersebut, baru 2 yang sudah ada MoU antara kedua negara yaitu OBP di S. Simantipal dan OBP pada titik C500-C600. Sedangkan 7 OBP yang masih dalam perundingan antara lain 4 OBP di wilayah Barat yaitu B400, G. Raya, Batu Aum, G. Jagoi. Untuk sektor timur terdapat 3 OBP yaitu P. Sebatik, S. Sinapad dan titik B2700-B3100. Belum selesainya penetapan batas wilayah antara kedua negara baik batas darat maupun batas maritim mengakibatkan rentannya hubungan diplomatik antar kedua negara. Pelanggaran dan kejahatan lintas batas terus terjadi di wilayah perbatasan yang masih dalam proses negosiasi.

Indonesia dan Malaysia sering kali dianggap sebagai dua negara anggota yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika pengambilan keputusan di ASEAN, terutama karena ukuran ekonomi, populasi, dan peran historis mereka dalam pembentukan serta pengembangan organisasi. Indonesia, sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan salah satu pendiri ASEAN, sering memimpin inisiatif diplomatik dan memainkan peran sentral dalam menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN di kancah regional dan global. Demikian pula, Malaysia, dengan pengalaman panjang dalam diplomasi regional dan kontribusinya terhadap kerangka kerja seperti Komunitas Keamanan ASEAN, turut membentuk arah kebijakan dan prioritas organisasi. Pengaruh kedua negara ini tercermin dalam kemampuan mereka untuk memprakarsai agenda, memediasi konflik, dan membentuk konsensus di antara negara-negara



anggota yang beragam, meskipun prinsip musyawarah mufakat tetap menjadi landasan pengambilan keputusan ASEAN (Acharya, 2014; Severino, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia dapat dimaksimalkan sebagai instrumen strategis dalam membentuk keamanan kolektif ASEAN, mengidentifikasi tantangan yang ada, serta merumuskan strategi kolaboratif guna mewujudkan stabilitas ASEAN di kawasan dengan mengambil contoh kasus situasi di Laut China Selatan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori strategi yang relevan untuk dianalisis adalah Teori Keamanan Kolektif dari Immanuel Kant (*Perpetual Peace: A Philosophical Sketch*, 1975), menjelaskan bahwa perdamaian dapat dijaga melalui kerja sama antarnegara untuk mencegah dan merespons agresi terhadap salah satu anggota sebagai ancaman terhadap seluruh komunitas. Dalam konteks ASEAN, teori ini tercermin pada pembentukan mekanisme seperti ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus, yang menjadi forum kerja sama pertahanan multilateral di kawasan. Indonesia dan Malaysia memanfaatkan platform ini untuk meningkatkan kerja sama maritim, pertukaran intelijen, dan latihan gabungan sebagai bentuk nyata penerapan prinsip keamanan kolektif ASEAN dalam menghadapi ancaman di Laut China Selatan.

Teori realisme hubungan internasional merupakan salah satu pendekatan paling dominan dalam studi hubungan internasional. Inti dari realisme adalah pandangan bahwa sistem internasional berada dalam kondisi anarki yaitu ketiadaan otoritas tertinggi yang mampu mengatur interaksi antarnegara. Dalam kerangka ini, negara adalah aktor utama yang rasional dan bertindak demi mempertahankan kepentingan nasionalnya, terutama dalam hal keamanan dan kelangsungan eksistensi. Neorealisme atau realisme struktural, seperti yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz (1979), menekankan bahwa struktur sistem internasional, bukan sifat manusia, yang mendorong negara untuk bersaing demi kekuasaan. Dalam sistem yang tidak menjamin keamanan secara kolektif, negara-negara terdorong untuk meningkatkan kapabilitas militer, membentuk aliansi, dan terlibat dalam diplomasi pertahanan sebagai strategi untuk bertahan hidup (Waltz, 1979).

Teori diplomasi pertahanan merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya kerjasama antara negara-negara dalam menjaga keamanan dan stabilitas, terutama dalam konteks ancaman militer. Diplomasi pertahanan tidak hanya mencakup strategi militer, tetapi juga melibatkan dialog politik, kerjasama internasional, dan pengembangan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah konflik. Kenneth Waltz, dalam karyanya "*Theory of International Politics*" (1979), mengemukakan bahwa sistem internasional bersifat anarkis, di mana negara-negara bertindak untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Dalam konteks ini, diplomasi pertahanan menjadi alat penting bagi negara-negara untuk membangun aliansi, memperkuat posisi mereka, dan mengurangi risiko konflik. Dengan memahami dinamika kekuasaan dan



interaksi antar negara, diplomasi pertahanan dapat membantu menciptakan stabilitas di kawasan yang rawan konflik, seperti Laut China Selatan.

Teori Pertahanan Kooperatif (Cooperative Defense) oleh Michael Clarke pada artikel "Towards a Theory of Cooperative Security" (1999). Teori ini mengemukakan bahwa pertahanan nasional harus melibatkan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara lain untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di tingkat regional maupun global. Clarke berargumen bahwa tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara-negara di kawasan, terutama yang berkaitan dengan agresi dari aktor eksternal seperti Tiongkok, tidak dapat diatasi secara efektif oleh satu negara saja. Oleh karena itu, pendekatan kooperatif menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia perlu mengadopsi prinsip-prinsip pertahanan kooperatif untuk membangun kerjasama yang lebih erat dalam bidang pertahanan dan keamanan. Indonesia dan Malaysia dapat mengembangkan perjanjian kerjasama dalam bidang pertahanan yang mencakup pertukaran intelijen, latihan militer bersama, dan pengembangan kebijakan keamanan yang terintegrasi. Dengan membangun hubungan yang kuat, kedua negara dapat saling mendukung dalam menghadapi ancaman yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam perkembangan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia dalam mendorong ASEAN sebagai stabilisator di kawasan, khususnya di Laut China Selatan. Pendekatan ini dipilih karena peneliti dapat memahami secara komprehensif terkait fenomena yang terjadi melalui data non-numerik yang diperoleh dari wawancara, studi dokumen, dan observasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah literatur ilmiah berupa jurnal akademik, buku, laporan kebijakan, dokumen resmi pemerintah, serta publikasi dari lembaga think tank yang relevan. Selain itu, dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen seperti pernyataan resmi dalam forum ADMM dan ADMM-Plus, hasil latihan MALINDO DARSASA, serta laporan bilateral dari Kementerian Pertahanan Indonesia dan Malaysia. Data sekunder ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola, makna, dan relasi antar konsep (Silverman, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber data yang telah dikumpulkan. Proses analisis dimulai dengan membaca secara mendalam seluruh dokumen, melakukan proses coding, mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang relevan (misalnya: bentuk kerja sama, isu strategis, peran ASEAN), hingga merumuskan temuan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana kerja sama RI–Malaysia tidak hanya memperkuat kedaulatan nasional, tetapi juga mendukung sentralitas ASEAN dalam menciptakan stabilitas kawasan (Braun & Clarke, 2022).



Dalam memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai jenis sumber (akademik, kebijakan, media resmi) dan mengecek konsistensinya. Validasi juga dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan teori yang digunakan, seperti teori realisme, keamanan kolektif, diplomasi pertahanan, dan sentralitas ASEAN. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan studi hubungan internasional dan kebijakan pertahanan di Asia Tenggara (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia

Perkembangan konflik di Laut China Selatan merupakan salah satu isu geopolitik paling kompleks di kawasan Asia Tenggara, yang melibatkan klaim tumpang tindih atas wilayah laut oleh beberapa negara, termasuk Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan sebagian wilayah Indonesia. Konflik ini semakin memanas sejak Tiongkok mengintensifkan kehadiran militernya melalui pembangunan pulau buatan, pengerahan kapal penjaga pantai dan nelayan bersenjata, serta deklarasi garis klaim historis yang dikenal sebagai *Nine-Dash Line* yang saat ini telah menjadi *Ten-Dash Line*, yang bertentangan dengan prinsip Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dalam UNCLOS 1982. Di sisi lain, negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia, meskipun tidak selalu memiliki klaim yang saling tumpang tindih secara langsung, turut terdampak oleh penetrasi kapal asing ke wilayah yurisdiksi mereka. Hal ini memunculkan risiko pelanggaran kedaulatan, konflik maritim, hingga gangguan terhadap jalur pelayaran strategis yang vital bagi perdagangan global. Morgenthau (1948) menekankan bahwa negara adalah aktor utama dalam politik internasional dan kekuatan militer adalah kunci untuk menjaga keamanan, dengan meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di Laut China Selatan menyebabkan terjadinya *Armed Race* di wilayah kawasan Asia Tenggara, hal tersebut merupakan hal yang wajar karena negara-negara akan berusaha untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara nya.

Hasil interpretasi dari kesepuluh narasumber yang berasal dari berbagai institusi strategis Indonesia menunjukkan kesepakatan yang kuat mengenai peningkatan eskalasi konflik di Laut China Selatan sebagai isu yang sangat krusial dan mengkhawatirkan. Dari sudut pandang diplomasi dan kebijakan luar negeri, seperti yang disampaikan oleh Diplomat Madya Dir Astara Kementerian Luar Negeri, konflik ini dipicu oleh klaim sepihak dan pengerahan kekuatan militer oleh Tiongkok, serta intensifikasi pembangunan fasilitas di wilayah sengketa. Ancaman utama yang diidentifikasi adalah pelanggaran wilayah oleh kapal penjaga pantai dan kapal ikan asing, yang bukan hanya mengganggu kedaulatan Indonesia dan Malaysia, tetapi juga memiliki potensi besar memicu insiden diplomatik. Narasumber ini menekankan perlunya pendekatan diplomatik yang tegas namun tetap konstruktif untuk mencegah konflik terbuka dan menjaga hubungan bilateral. Berdasarkan teori pertahanan kooperatif, Clarke (1999) bahwa pertahanan nasional harus melibatkan kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara lain untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di tingkat regional maupun global, sehingga



untuk mengatasi situasi di Laut China Selatan. Indonesia maupun Malaysia memerlukan kerjasama bilateral untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil.

Seluruh narasumber sepakat bahwa eskalasi konflik di Laut China Selatan merupakan ancaman nyata dan kompleks yang mengancam keamanan nasional kedua negara dan stabilitas kawasan secara umum. Meskipun mereka berasal dari latar belakang berbeda diplomasi, kebijakan, militer operasional, hingga teknis semua menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas sektor dan peningkatan kerja sama bilateral yang berkelanjutan. Mereka mendorong respons yang komprehensif: menggabungkan diplomasi aktif, penguatan sistem pertahanan laut, serta peningkatan kapasitas teknis pendukung seperti data maritim dan sistem pemantauan. Pendekatan kolektif ini diperlukan agar Indonesia dan Malaysia dapat mempertahankan kedaulatan wilayah masing-masing, menghindari konflik terbuka, dan memperkuat posisi ASEAN sebagai stabilitas di tengah rivalitas geopolitik global yang kian tajam.

Implementasi diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Malaysia dalam menyikapi perkembangan di Laut China Selatan berada dalam fase yang cukup aktif dan konstruktif, didorong oleh kesamaan kepentingan dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama di wilayah perairan strategis seperti Laut China Selatan, Selat Malaka, dan Laut Sulu-Sulawesi. Hubungan bilateral kedua negara di bidang pertahanan diwujudkan melalui berbagai mekanisme formal seperti pertemuan tahunan *Defence Cooperation Committee (DCC)*, *General Border Committee (GBC)*, dan *Joint Working Group (JWG)* yang secara rutin mengevaluasi perkembangan kerja sama serta merumuskan agenda ke depan. Selain itu, keduanya juga terlibat dalam latihan gabungan seperti Latihan Malindo Darsasa, patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan laut, serta pertukaran personel militer dan pendidikan di lembaga strategis pertahanan. Bentuk kerja sama ini mencerminkan pendekatan diplomasi pertahanan yang berbasis pada *confidence building measures* dan penguatan interoperabilitas antara TNI dan Angkatan Tentera Malaysia (ATM).

Secara regional, Indonesia dan Malaysia juga menunjukkan sinergi dalam kerangka *ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM)* dan *ADMM-Plus*, dengan mendorong agenda-agenda kolektif seperti keamanan maritim, peningkatan kesiapsiagaan regional, dan pembentukan *Code of Conduct (COC)* untuk Laut China Selatan. Kedua negara secara konsisten menyuarakan pentingnya menjaga sentralitas ASEAN dalam menyikapi rivalitas kekuatan besar, serta mengedepankan prinsip non-intervensi, penyelesaian damai, dan penghormatan terhadap hukum internasional (UNCLOS 1982). Dalam forum-forum tersebut, Indonesia dan Malaysia kerap menginisiasi dialog strategis yang mencerminkan kesamaan persepsi terhadap ancaman kawasan, termasuk keprihatinan terhadap eskalasi militerisasi oleh aktor eksternal seperti Tiongkok dan Amerika Serikat. Sinergi ini tidak hanya memperkuat posisi ASEAN secara kolektif, tetapi juga membuka ruang koordinasi lebih lanjut untuk menghadapi tekanan geopolitik yang semakin kompleks.

Interpretasi dari *output* analisa mengenai diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Malaysia saat ini menunjukkan bahwa kedua negara tidak hanya berfokus pada aspek teknis-militer, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral dan mencegah konflik terbuka hal ini sesuai dengan teori keterhubungan yang dikembangkan oleh Keane-Nye (1977) dimana negara-negara di suatu kawasan yang sama akan saling bergantung dalam berbagai aspek, termasuk



ekonomi dan keamanan. Hal ini sejalan dengan temuan Siti et al (2021), yang menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan yang diambil oleh Indonesia dan Malaysia, keduanya telah mengadopsi strategi yang semakin kompleks di wilayah tersebut. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerja sama dalam konteks keamanan regional, yang relevan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat sinergi pertahanan mereka.

4.2. Kendala dan Tantangan Utama Peningkatan Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia

Peningkatan kerja sama diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Malaysia, meskipun vital dalam merespons ketegangan di Laut China Selatan, menghadapi serangkaian kendala dan tantangan utama yang bersifat kompleks dan multidimensional. Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber, teridentifikasi beberapa hambatan signifikan yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan kerja sama di masa depan. Salah satu hambatan fundamental adalah perbedaan prioritas strategis nasional antara kedua negara. Dirkersinhan Kemenhan RI, Atase Laut RI KL, dan Asisten Athan Malaysia secara konsisten menyoroti bahwa masing-masing negara memiliki agenda dan kepentingan nasional yang terkadang tidak sepenuhnya selaras, yang dapat memengaruhi tingkat kedalaman dan cakupan kerja sama. Hal ini diperparah oleh dinamika politik domestik di masing-masing negara, sebagaimana disampaikan oleh Diplomat Madya Kemenlu RI, Kabid ASEAN Puskersin TNI, Atase Laut RI KL, dan Atase Udara RI KL.

Selain itu, birokrasi administratif yang kompleks dan seringkali berlapis menjadi kendala nyata. Dirkersinhan Kemenhan RI, Diplomat Madya Kemenlu RI, Atase Pertahanan RI KL, dan Asisten Athan Malaysia menyebutkan bahwa proses birokrasi antar lembaga, baik di tingkat kementerian pertahanan maupun kementerian luar negeri, dapat memperlambat implementasi kesepakatan yang telah dicapai. Keterbatasan anggaran pertahanan di kedua negara, sebagaimana diungkapkan oleh Dirkersinhan Kemenhan RI, Kabid ASEAN Puskersin TNI, dan Atase Udara RI KL, juga menjadi faktor penghambat yang berdampak langsung pada frekuensi dan skala latihan gabungan serta patroli terkoordinasi yang idealnya dilaksanakan secara rutin.

Isu sensitivitas terhadap kedaulatan dan yurisdiksi maritim merupakan tantangan krusial dan paling sering disebut. Hampir semua narasumber, termasuk Dirkersinhan Kemenhan RI, Diplomat Madya Kemenlu RI, Asops Pushidrosal, Aspamkersamtas Pushidrosal, Atase Pertahanan RI KL, Atase Laut RI KL, Atase Udara RI KL, dan Asisten Athan Malaysia, menekankan bahwa perbedaan pandangan atau klaim terkait batas wilayah maritim menuntut kehati-hatian diplomatik tingkat tinggi. Sensitivitas ini seringkali menimbulkan keengganan untuk menyepakati kerja sama operasional yang lebih mendalam, terutama di wilayah-wilayah yang masih menjadi sengketa atau tumpang tindih.

Selanjutnya, perbedaan doktrin militer, aturan keterlibatan (*Rules of Engagement*), dan interoperabilitas alutsista juga menjadi hambatan teknis yang signifikan. Paban Ops Koarmada RI, Kabid ASEAN Puskersin TNI, Atase Laut RI KL, Atase Udara RI KL, dan Asisten Athan Malaysia menjelaskan bahwa perbedaan ini memerlukan waktu, latihan intensif, dan



penyusunan Standar Prosedur Operasi (SOP) bersama untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaan operasi. Kendala komunikasi teknis di lapangan, seperti yang disebutkan oleh Dirkersinhan Kemenhan RI dan Aspamkersamtas Pushidrosal, juga dapat menghambat koordinasi yang efektif dan berpotensi memicu friksi jika tidak ditangani dengan baik.

Faktor eksternal, khususnya tekanan dari kekuatan besar seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, turut memengaruhi ruang gerak diplomasi pertahanan kedua negara. Diplomat Madya Kemenlu RI menyebutkan bahwa tekanan ini dapat memengaruhi kebijakan regional dan menuntut kehati-hatian agar tidak terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Atase Pertahanan RI KL juga menambahkan bahwa terkadang terdapat tantangan dalam menyinkronkan agenda militer dengan kebijakan luar negeri, yang penting untuk menjaga kredibilitas dan posisi strategis di mata internasional. Menurut Ariani et al. (2023) kolaborasi antara kekuatan militer dan diplomasi internasional dalam menghadapi taktik abu-abu yang diterapkan oleh Tiongkok merupakan hal yang penting. Indonesia perlu mengembangkan strategi pertahanan yang lebih adaptif dan responsif dalam mengatasi perkembangan situasi di Laut China Selatan.

Disamping itu terdapat hambatan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia dalam memperkuat posisi ASEAN yang terutama bersumber dari perbedaan prioritas nasional, struktur organisasi militer, serta sensitivitas isu kedaulatan dan perbatasan yang kerap menjadi titik rawan dalam kerja sama bilateral. Keterbatasan anggaran, infrastruktur pertahanan, dan interoperabilitas sistem juga menghambat optimalisasi sinergi operasional di lapangan. Selain itu, tantangan komunikasi lintas institusi, baik di tingkat militer maupun diplomatik, serta birokrasi yang lambat seringkali menghambat harmonisasi kebijakan luar negeri dan pertahanan kedua negara.

Kesimpulannya kendala dalam peningkatan kerja sama diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia tidak hanya bersifat teknis atau operasional, tetapi juga strategis dan politis. Mengatasi hambatan ini memerlukan komitmen politik tingkat tinggi yang berkelanjutan, komunikasi intensif lintas sektor dan antar-personel, penyelarasan doktrin dan standar teknis, serta pendekatan yang adaptif dan inklusif untuk menjaga kebersamaan dalam menghadapi dinamika keamanan kawasan yang terus berubah.

4.3. Strategi Meningkatkan Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia Mewujudkan Stabilitas ASEAN

Strategi yang dikembangkan untuk mengoptimalkan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia dalam rangka mewujudkan stabilitas ASEAN untuk mendukung keamanan di Laut China Selatan dapat dikaitkan dengan beberapa teori strategi utama dalam studi hubungan internasional dan keamanan.

Pertama, penekanan pada "fleksibilitas, adaptif, dan berbasis kepentingan bersama," "prinsip *early engagement* dan *maritime confidence building*," serta "penguatan mekanisme konsultasi cepat" dan "penyusunan protokol insiden maritim" sangat selaras dengan teori Keamanan Kooperatif (*Cooperative Security*) dan Institusionalisme Neoliberal (Neoliberal Institutionalism). Teori-teori ini menekankan pentingnya kerja sama melalui institusi, norma bersama, dan langkah-langkah pembangunan kepercayaan (*confidence-building measures*) untuk mengurangi ketegangan, mencegah konflik, dan mencapai stabilitas



kolektif di tengah anarki internasional. Pendekatan ini mengakui bahwa kepentingan nasional dapat dicapai secara lebih efektif melalui kolaborasi daripada konfrontasi, terutama di wilayah yang kompleks seperti Laut China Selatan.

Kedua, pencantuman "aspek non-tradisional seperti keamanan siber dan perlindungan jalur logistik" ke dalam agenda kerja sama mencerminkan pendekatan Keamanan Komprehensif (*Comprehensive Security*). Teori ini memperluas definisi keamanan melampaui ancaman militer tradisional untuk mencakup isu-isu seperti keamanan siber, keamanan energi, keamanan lingkungan, dan keamanan maritim yang lebih luas. Dengan demikian, diplomasi pertahanan tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga pada perlindungan aset vital dan infrastruktur kritis yang rentan terhadap ancaman non-militer.

Ketiga, penekanan pada "fleksibilitas, inklusivitas, dan berbasis norma internasional," "hukum internasional," "mekanisme pencegahan konflik," "*early warning system*," dan "*hotlines* antar militer" sangat konsisten dengan prinsip-prinsip Institusionalisme Liberal (*Liberal Institutionalism*). Teori ini berpendapat bahwa institusi internasional dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional dapat memitigasi sifat anarkis sistem internasional, memfasilitasi kerja sama, dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas. Mekanisme komunikasi dan pencegahan konflik ini membantu menjaga saluran dialog tetap terbuka dan mengurangi risiko salah perhitungan yang dapat menyebabkan eskalasi.

Keempat, pandangan yang menekankan diplomasi pertahanan yang "berbasis data, responsif, pragmatis, dan mampu menghadirkan solusi teknis," termasuk "pembentukan *Maritime Information Fusion Center* bersama," "pelatihan survei hidro-oseanografi," dan "pengembangan peta bersama," mengindikasikan penerapan strategi Kesadaran Domain Maritim (*Maritime Domain Awareness - MDA*). MDA adalah pemahaman yang efektif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan domain maritim yang dapat memengaruhi keamanan, keselamatan, ekonomi, atau lingkungan suatu negara. Dengan meningkatkan kekuatan pengetahuan maritim dan berbagi informasi secara terpadu, kedua negara dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan respons yang lebih efektif terhadap tantangan kedaulatan dan keamanan di laut.

Keselarasannya antara kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan merupakan elemen fundamental bagi efektivitas diplomasi kawasan, terutama bagi Indonesia dan Malaysia dalam memperkuat posisi ASEAN sebagai stabilitasator. Sinergi ini memastikan bahwa langkah-langkah pertahanan di lapangan selalu mendukung tujuan diplomasi politik di forum regional maupun global, menghindari perbedaan narasi dan fragmentasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh aktor eksternal. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi krusial untuk merumuskan posisi bersama yang konsisten, menyelaraskan visi strategis nasional dengan kepentingan kolektif ASEAN, serta memastikan legitimasi politik atas tindakan-tindakan operasional militer. Dengan keselarasannya ini, ASEAN mampu tampil sebagai kekuatan yang solid, mandiri, dan kredibel dalam menghadapi dinamika geopolitik Indo-Pasifik secara damai dan berprinsip.

Di tingkat regional dan global, strategi peningkatan diplomasi pertahanan Indonesia–Malaysia harus ditempatkan dalam konteks memperkuat posisi ASEAN sebagai aktor kolektif. Sesuai dengan Undang-Undang RI No 37 tahun 2000 tentang Hubungan Internasional pada pasal 4 yang berbunyi "Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif,



dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan”, maka Indonesia dan Malaysia dapat berperan aktif dalam memformulasikan dan memimpin inisiatif keamanan di forum *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus, termasuk mendorong penyusunan kerangka kerja regional untuk penanganan insiden di laut (*maritime incident response*) serta penyusunan standar operasional bersama untuk patroli perbatasan. *ASEAN Defence Ministers' Meeting* (ADMM) dan ADMM-Plus, menjadi forum kerja sama pertahanan multilateral di kawasan. Indonesia dan Malaysia memanfaatkan platform ini untuk meningkatkan kerja sama maritim, pertukaran intelijen, dan latihan gabungan sebagai bentuk nyata penerapan prinsip keamanan kolektif ASEAN dalam menghadapi ancaman di Laut China Selatan, hal tersebut sesuai dengan teori keamanan kolektif dari Kant (1975).

Pentingnya dialog strategis juga tidak dapat diabaikan. Meningkatkan dialog *2plus2* antara Menlu dan Menhan dari kedua negara akan memastikan keselarasan kebijakan dan memperkuat hubungan bilateral, sesuai dengan rekomendasi Junaidi dan Putra (2024) yang menyoroti pentingnya dialog terbuka dalam menjaga stabilitas kawasan. Secara keseluruhan, strategi yang direkomendasikan ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis militer, tetapi juga mencakup pendekatan yang lebih holistik dan inklusif. Dengan mengintegrasikan langkah-langkah tersebut ke dalam kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia, kedua negara dapat memperkuat posisi mereka sebagai jangkar stabilitas di kawasan, khususnya di Laut China Selatan, dan memastikan keberlanjutan kerja sama yang efektif dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Kontribusi diplomasi Indonesia-Malaysia dalam penguatan ASEAN sebagai stabilitas kawasan sangat strategis karena kedua negara memainkan peran kunci sebagai motor penggerak sinergi regional di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks. Berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2000, pasal 1, menyatakan Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara maka Indonesia harus mempunyai kontribusi dalam menjalin hubungan Luar Negeri secara bilateral. Melalui kerja sama pertahanan bilateral yang intensif, seperti patroli terkoordinasi, latihan militer bersama, dan pertukaran informasi keamanan maritim, Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen nyata terhadap penyelesaian isu-isu kawasan secara damai dan mandiri, tanpa intervensi pihak eksternal. Peningkatan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia selaras dengan konsep peningkatan yang ditekankan oleh W. Edward Deming (2000) dan Joseph M. Juran (1999), yang menekankan pentingnya upaya kedua negara untuk merencanakan, mengukur, dan mempelajari hubungan diplomasi kedua negara guna memperkuat hubungan bilateral, baik melalui dialog, kerja sama militer, maupun pertukaran data serta informasi. Pendekatan diplomasi pertahanan ini sejalan dengan prinsip sentralitas ASEAN, di mana kolaborasi intra-ASEAN diprioritaskan untuk menjaga stabilitas, memitigasi eskalasi konflik, dan memperkuat posisi tawar kolektif ASEAN di forum regional maupun global. Dengan memperkuat harmonisasi kebijakan luar negeri dan pertahanan, serta mendorong diplomasi lintas sektor yang inklusif, kerja sama Indonesia-Malaysia tidak hanya memperkuat solidaritas ASEAN tetapi juga meningkatkan kapabilitas kolektif kawasan dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional maupun non-tradisional di Indo-Pasifik.



Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka strategi peningkatan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia dalam mewujudkan stabilitas ASEAN dalam mendukung keamanan di Laut China Selatan, antara lain:

- a. Penguatan koordinasi institusional dan kerangka kerja sama bilateral, melalui:
 - 1) Pembentukan kerangka kerja tetap untuk konsultasi pertahanan bilateral, hal tersebut dilaksanakan dalam rangka menciptakan stabilitas jangka panjang dan memfasilitasi respons yang lebih efektif terhadap tantangan keamanan.
 - 2) Pembentukan *Joint Maritime Task Force*, untuk melakukan patroli gabungan secara terkoordinasi di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara.
 - 3) Pengembangan sistem komunikasi taktis dan pusat data intelijen bersama yaitu dengan mengembangkan MRCC (*Maritime Rescue Coordination Center*) di wilayah Laut China Selatan, MRCC ini bisa ditempatkan di Pulau Natuna, Indonesia dan di Pulau yang berada di wilayah Malaysia.
- b. Peningkatan Diplomasi Pertahanan Militer dan Kepercayaan Strategis (*Strategic Trust*), melalui:
 - 1) Perluasan latihan bersama (*Joint Exercises*) antara Indonesia-Malaysia, Indonesia-Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya, serta ASEAN dengan Tiongkok-USA. Latihan bersama mencakup simulasi keamanan maritim dan *Humanitarian Assistance Disaster Relief* (HADR). *Joint Exercises* antara negara ASEAN pertama kali dicanangkan oleh Indonesia dengan nama *ASEAN Solidarity Exercise* (ASEX)-01-Natuna 2023 yang fokus pada keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. Latihan bersama seperti itu dapat di usulkan dalam kegiatan ADMM-Plus dengan mengajak negara-negara lain ikut melaksanakan Latma terutama Tiongkok dan USA dalam rangka menciptakan stabilitas dan keamanan kawasan.
 - 2) Mendorong pertukaran pendidikan dan pelatihan yang lebih luas dengan melibatkan anggota angkatan bersenjata negara-negara ASEAN, hal tersebut sudah dilakukan oleh Indonesia melalui TNI AL dengan mengundang *cadet-cadet* akademi AL negara-negara ASEAN dan negara lainnya untuk mengikuti *Cadet Sail* menggunakan KRI Bimasuci. Program ini merupakan salah satu bentuk diplomasi pertahanan Indonesia dalam membangun *confidence building measures* pada calon-calon tentara negara-negara sahabat.
 - 3) Indonesia-Malaysia dapat menyelesaikan semua permasalahan dalam dialog dan diplomasi yang sesuai dengan norma-norma hubungan antar negara. Permasalahan antar negara diselesaikan dalam ruang diskusi yang dilandasi pada saling percaya dan terbuka, tidak diselesaikan dalam pendekatan diluar hal tersebut.
- c. Pengembangan Platform Pertukaran Data dan Intelijen:
 - 1) Membangun sistem pertukaran data *Real-Time* antar pusat operasi kedua negara untuk mendeteksi dan merespons ancaman di perbatasan maritim.
 - 2) Pembentukan *Maritime Information Fusion Center* bersama, untuk meningkatkan kekuatan informasi maritim dan berbagi secara terpadu.
 - 3) Pelatihan survei hidro-oseanografi dan pengembangan peta bersama, untuk meningkatkan *Maritime Domain Awareness* (MDA). Delegasi Indonesia dan Malaysia yang tergabung dalam *Sub Committee on Undersea Features Names* (SCUFN) di bawah organisasi GEBCO (*General Bathymetric Chart of The Ocean*)

telah mengajukan penangguhan pemberian nama objek bawah laut di Laut China Selatan karena terjadi permasalahan penamaan fitur bawah laut dimana masing-masing negara yang mengklaim telah memberikan nama yang berbeda-beda pada satu fitur bawah laut yang sama berdasarkan kepentingan negara-negara *claimant*. Hal tersebut dapat membahayakan bagi pengguna laut karena ketidakpastian saat bernavigasi pada saat melakukan pelayaran.

- d. Peningkatan dialog strategis (*2plus2*) antara menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari kedua negara untuk memastikan keselarasan kebijakan dan memperkuat hubungan bilateral.
- e. Pendekatan holistik, inklusif, dan berbasis norma:
 - 1) Pelibatan sektor Non-Militer, seperti masyarakat sipil dan lembaga riset, untuk memperkuat legitimasi dan keberlanjutan kerja sama pertahanan.
 - 2) Fleksibilitas, inklusivitas, dan berbasis norma Internasional dengan mengedepankan pencegahan konflik melalui peningkatan interoperabilitas militer, transparansi, dan pertukaran informasi *real-time*.
 - 3) Keselarasan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan, untuk memastikan bahwa langkah-langkah pertahanan di lapangan selalu mendukung tujuan diplomasi politik dan menghindari fragmentasi kebijakan.
- f. Penguatan posisi ASEAN sebagai aktor kolektif, melalui:
 - 1) Berperan aktif dalam ADMM dan *ADMM-Plus* dengan memformulasikan dan memimpin inisiatif keamanan.
 - 2) Mendorong penyusunan kerangka kerja regional, untuk penanganan insiden di laut (*maritime incident response*) serta penyusunan standar operasional bersama untuk patroli perbatasan dan kesepakatan *Code of Conduct (CoC) in the South China Sea*.
 - 3) Menjaga netralitas dan mendukung dialog multilateral inklusif, terutama di tengah rivalitas kekuatan besar di Laut China Selatan, dengan berpegang pada prinsip hukum internasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan.

i. Implementasi Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia

Implementasi diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia telah terwujud secara aktif dan konstruktif melalui berbagai mekanisme bilateral dan multilateral. Secara bilateral, kedua negara secara rutin menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi seperti Defence Cooperation Committee (DCC), General Border Committee (GBC), Joint Working Group (JWG), serta dialog pertahanan tahunan, yang diperkuat dengan patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan maritim, Selat Malaka, dan Laut Sulu (seperti Patkor Malindo dan Patkor Optima), latihan gabungan (contohnya Latihan Malindo Darsasa dan Fleet Exercise), serta pertukaran personel dan pendidikan militer. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya meningkatkan interoperabilitas dan kesiapan operasional, tetapi juga membangun kepercayaan strategis (*confidence building measures*) dan menyelaraskan pandangan dalam menghadapi ancaman maritim seperti pelanggaran wilayah, illegal fishing, dan grey-zone tactics. Di tingkat regional, Indonesia dan Malaysia bersinergi aktif dalam forum ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM) dan ADMM-Plus, di



mana mereka secara konsisten mendorong agenda keamanan maritim, kesiapsiagaan regional, dan percepatan Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan, menegaskan sentralitas ASEAN, penyelesaian damai, dan penghormatan terhadap UNCLOS 1982.

ii. Kendala dan Tantangan Utama Peningkatan Kerjasama Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia

Peningkatan kerja sama diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Malaysia menghadapi kendala multidimensional yang signifikan. Hambatan utama meliputi perbedaan prioritas strategis nasional dan dinamika politik domestik yang memengaruhi konsistensi implementasi kesepakatan, serta birokrasi administratif yang kompleks dan keterbatasan anggaran pertahanan yang membatasi frekuensi latihan gabungan. Isu sensitivitas terhadap kedaulatan dan yurisdiksi maritim, termasuk kerahasiaan data militer dan perbedaan standar teknis pemetaan laut, menjadi tantangan krusial yang menghambat kerja sama operasional yang lebih mendalam. Selain itu, perbedaan doktrin militer, aturan keterlibatan (Rules of Engagement), dan interoperabilitas alutsista menimbulkan hambatan teknis yang memerlukan penyesuaian SOP bersama

iii. Strategi Meningkatkan Diplomasi Pertahanan Indonesia-Malaysia Mewujudkan Stabilitas ASEAN

Terkait peningkatan diplomasi pertahanan antara Indonesia dan Malaysia, yang bertujuan untuk mengukuhkan peran ASEAN sebagai stabilisator regional yang kredibel khususnya di Laut China Selatan, menuntut implementasi strategi komprehensif.

- a. Strategi ini mengintegrasikan penguatan koordinasi institusional dan kerangka kerja sama bilateral eksisting dengan pendekatan dinamis, meliputi mendorong penyelesaian batas maritim maupun darat yang masih ada antara Indonesia-Malaysia, mendorong pembentukan gugus tugas maritim gabungan (Joint Maritime Task Force) yang terdiri dari negara-negara yang tergabung dalam ADMM-Plus, pengembangan sistem komunikasi taktis terintegrasi antara TNI dan ATM, dan pendirian pusat data intelijen bersama yang bertujuan untuk memberikan respon cepat terhadap perkembangan situasi di Laut China Selatan.
- b. Implementasi strategi didukung oleh penguatan diplomasi militer melalui perluasan latihan bersama dan program pertukaran personel, serta pelibatan sektor non-militer untuk menumbuhkan kepercayaan strategis dan interoperabilitas antara TNI dan ATM.
- c. Strategi mewujudkan keselarasan kebijakan luar negeri dan pertahanan untuk menjadi prasyarat fundamental, di mana Indonesia dan Malaysia secara proaktif memimpin inisiatif keamanan dalam forum regional seperti ADMM dan ADMM-Plus, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas, hukum internasional, dan sentralitas ASEAN. Indonesia-Malaysia harus terus berperan aktif dalam mewujudkan kesepakatan Code of Conduct (CoC) yang dapat mengatur para pihak dalam melakukan kegiatan di Laut China Selatan. Disamping itu melalui ADMM-Plus, Indonesia dan Malaysia dapat mendorong dilaksanakannya Joint Maritime Exercises di kawasan Laut China Selatan yang diikuti oleh negara-negara yang tergabung dalam ADMM-Plus dengan menjunjung tinggi sentralitas ASEAN.



b. Saran.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, disampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terkait pentingnya peningkatan diplomasi pertahanan Indonesia-Malaysia dalam rangka mewujudkan stabilitas ASEAN untuk mendukung keamanan di kawasan Laut China Selatan. Adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

- a. Kementerian Pertahanan (Kemenhan RI)
 - 1) Mengembangkan grand strategy kerja sama pertahanan bilateral Indonesia–Malaysia sebagai model inisiatif kolektif ASEAN dalam menghadapi dinamika Laut Cina Selatan.
 - 2) Dalam konteks latihan bersama ASEAN–Tiongkok–USA, Kemenhan harus menetapkan posisi Indonesia sebagai fasilitator netral, yang mendorong latihan berbasis isu non-tradisional seperti HADR (Humanitarian Assistance and Disaster Relief) dan keamanan maritim.
 - 3) Menegaskan prinsip “sentralitas ASEAN” agar ASEAN tidak terpecah oleh rivalitas kekuatan besar dalam pelaksanaan latihan bersama.
- b. Tentara Nasional Indonesia (TNI) – Mabes TNI dan TNI AL
 - 1) Meningkatkan interoperabilitas dengan Malaysia melalui latihan bilateral yang rutin, seperti MALINDO DARSASA, serta siapkan TNI AL sebagai ujung tombak pelibatan dalam latihan ASEAN.
 - 2) Dalam konteks latihan ASEAN–Tiongkok–USA, TNI harus:
 - (a) Menyusun Rules of Engagement (ROE) yang jelas dan ketat.
 - (b) Memastikan semua skenario latihan memiliki hasil yang dapat ditindaklanjuti (actionable).
 - (c) Menetapkan zona latihan di wilayah non-sengketa untuk menghindari provokasi.
 - 3) Melibatkan Koarmada RI dan Puskodal TNI untuk pemantauan operasional lintas negara secara real-time dan dapat melaksanakan data sharing dengan Puskodal yang dimiliki oleh Malaysia.
- c. Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI)
 - 1) Mendorong percepatan penandatanganan Code of Conduct (CoC) in the Sout China Sea antara ASEAN dengan Tiongkok.
 - 2) Membuat usulan terkait pengelolaan bersama Sumber Daya Alam di Laut China Selatan untuk menjaga stabilitas di kawasan.
 - 3) Mendorong harmonisasi narasi kebijakan luar negeri dan pertahanan melalui koordinasi erat dengan Kemenhan dan TNI, khususnya terkait Laut Cina Selatan.
 - 4) Dalam kerangka latihan bersama ASEAN–Tiongkok–USA, Kemlu perlu:
 - (a) Mendorong penggunaan forum ADMM dan ADMM-Plus sebagai wahana formal perencanaan dan evaluasi latihan.
 - (b) Menjaga posisi ASEAN sebagai aktor utama, bukan sekadar peserta.



-
- (c) Mewujudkan transparansi melalui Confidence Building Measures (CBMs), seperti pengiriman pengamat lintas negara dan publikasi hasil latihan bersama.
- d. Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam)
- 1) Mengkoordinasikan lintas sektor antara pertahanan, diplomasi, dan intelijen dalam menyikapi potensi implikasi politik dari latihan gabungan ASEAN dengan Tiongkok dan USA.
 - 2) Memastikan bahwa pelaksanaan latihan bersama tidak bertentangan dengan kepentingan strategis nasional dan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.
 - 3) Mengkaji kemungkinan penerbitan Strategic Guidance Document nasional terkait keterlibatan Indonesia dalam latihan militer multilateral di kawasan Indo-Pasifik.
- e. Sekretariat Nasional ASEAN
- 1) Menggunakan kerja sama Indonesia–Malaysia sebagai best practices ASEAN dalam diplomasi pertahanan untuk membentuk template latihan kolektif.
 - 2) Mendorong ASEAN agar membentuk Joint Training Coordination Mechanism untuk mengatur pelaksanaan latihan bersama secara terstruktur, netral, dan inklusif.
 - 3) Memastikan latihan bersama ASEAN–Tiongkok–USA disertai dengan agenda penyusunan normatif, seperti Maritime Code of Conduct (COC) atau Rules of Naval Interaction di Laut Cina Selatan.
- f. Pusat Kerja Sama Internasional TNI (Puskersin TNI)
- 1) Mengembangkan dokumen SOP (Standard Operating Procedure) latihan gabungan dengan modul ASEAN–Tiongkok–USA yang dapat diadopsi negara anggota ASEAN lainnya.
 - 2) Melaksanakan simulasi dan uji coba komunikasi lintas armada (naval communication drills) untuk meningkatkan kesiapan teknis dalam latihan skala besar.
 - 3) Membuat basis data bersama mengenai hasil-hasil latihan bilateral dan multilateral untuk menjadi acuan pembentukan interoperabilitas kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *The ASEAN way: Southeast Asia's regional order*. Stanford University Press.
- Acharya, A. (2018). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (3rd ed.). Routledge.
- Amalia, F. S., Mahroza, J., Halkis, M., Priyanto, P., Purwanto, S., Gunawan, R., ... & David, L. (2024). *DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA-AUSTRALIA UNTUK HUMANITARIAN ASSISTANCE AND DISASTER RELIEF (HADR)*.



-
- Abdullah, K., & Tan, M. Y. (2022). Malaysia's Maritime Strategy and South China Sea Disputes. *Journal of Strategic and International Studies*, 15(3), 101–120.
- Aziz, N. N. b. A., & Yazid, M. N. b. M. (2022). Confident Building Measures (CBM) Sebagai Pemudahcara Komunikasi dalam Rundingan GBC Malindo. *Jurnal Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies*, 49(2), 1–20.
- Aziz, R. (2023). Navigating The Storm: ASEAN's Strategy Amidst Two Major Powers. *Global Political Studies*, 7(1), 1–16.
- Baker, L., & Lee, C. H. (2023). US Freedom of Navigation Operations and Strategic Competition in the South China Sea. *Asian Defense Policy Review*, 11(1), 77–95.
- Batongbacal, J. A. (2022). The Nine-Dash Line: A Legal Critique from the Philippine Perspective. *Journal of Maritime Law and Policy*, 19(2), 112–128.
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Bermana, S., Prakoso, L. Y., Patmi, S., Al-Mujaddid, T. F., Habibie, S. Y., Susmoro, H., ... & Gunawan, R. (2025). UNDERWATER SURVEILLANCE PERTAHANAN LAUT INDONESIA.
- Bull, H. (2012). *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics* (4th ed.). Columbia University Press.
- Caballero-Anthony, M. (2021). Negotiating Security: Strategies of Southeast Asian States. *Contemporary Southeast Asia*, 43(3), 280–298.
- Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2000). *Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research*. Jossey-Bass.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Pearson.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE.
- Diantha, I. M. P., Dewi, I. G. A. A. T., & Mahardika, I. G. N. A. (2023). National Defense in the Resolution of Border Disputes: The Experience of Indonesia and Malaysia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1), 1–19.
- Deming, W. E. (2000). *Out of the crisis*. MIT Press.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Gerring, J. (2022). *Case Study Research: Principles and Practices* (2nd ed.). Cambridge University Press.



-
- Grieco, J. M. (2020). Realism and International Cooperation: The Limits of Neoliberal Institutionalism. *International Relations*, 34(2), 145–162
- Hayton, B. (2022). *The South China Sea: The Struggle for Power in Asia*. Yale University Press.
- Hamdani, R., & Salim, F. (2023). Interoperability and Military Cooperation between Indonesia and Malaysia in Maritime Security. *Southeast Asia Security Journal*, 8(1), 33–52.
- Hidayat, A. R., Alifah, N., Rodiansjah, A. A., & Asikin, M. Z. (2024). Sengketa Laut Cina Selatan: Analisis Realis terhadap Perebutan Kekuasaan, Respon Regional, dan Implikasi Geopolitik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(2), 579-591.
- Hermansah, F., Mahroza, J., Halkis, M., Prakoso, L. Y., Purwanto, S., Sutanto, R., ... & David, L. (2024). DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA AFGANISTAN DALAM PENYELESAIAN PERDAMAIAN TAHUN 2018-2023.
- Ichsan, M., & Adhitya, M. (2021). Kalimantan Border Issues and Indonesia's Border Diplomacy Towards Malaysia. *Natapraja: Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 173–187.
- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (Eds.). (1999). *Juran's Quality Handbook* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Karim, N. A., Hassan, A., & Sulaiman, H. (2023). Malaysia's Defense Diplomacy in ASEAN: Navigating the China-US Rivalry. *ASEAN Defense Review*, 5(2), 77–96.
- Karim, N. A., Hassan, A., & Sulaiman, H. (2023). Malaysia's Defense Diplomacy in ASEAN: Navigating the China-US Rivalry. *ASEAN Defense Review*, 5(2), 77–96.
- Kuo, L. H., & Zhang, X. (2023). Artificial Island Building and Militarization in the South China Sea: Geostrategic Implications. *International Affairs Journal*, 17(3), 201–220.
- Kupchan, C. A., & Adler, E. (2000). Collective Security and the Future of International Order. *International Organization*, 54(1), 135–170
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. ISBN 978-979-8878-04-6.
- Kupchan, C. A., & Adler, E. (2000). Collective Security and the Future of International Order. *International Organization*, 54(1), 135–170
- Marsetio, L. (2013). *The Importance of Sea Power in Indonesian Defense Strategy*. Jakarta: Indonesian Navy.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. W. W. Norton & Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE.
- Ministry of Defence Malaysia (2020). *Defence White Paper*. ISBN 978-967-16437-6-1.



-
- Morgenthau, H. J. (1948). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfred A. Knopf.
- Nguyen, M. T., & Lee, S. J. (2022). ASEAN Centrality and Regional Security Mechanisms. *Pacific Affairs*, 95(4), 513–531.
- Nguyen, H. D. (2023). ASEAN's central role in power competition between China and the US in Southeast Asia. *Science & Technology Development Journal - Social Sciences & Humanities*, 7(1), 702–711.
- Permana, S. (2021). The ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: Indonesia's Strategic Interests and Challenges. *Jurnal Global & Strategis*, 15(1), 1–18.
- Putri, A. R., & Lim, T. H. (2023). Defense Diplomacy as a Strategy of Middle Powers in Southeast Asia. *International Affairs Review*, 9(3), 118–137.
- Purwanto, S., Wibowo, A., & Suharti, T. (2023). The OCB Determinant of Employees in Non-Profit Organization; Leadership Role and Work Engagement. *inovator*, 12(2), 251-263.
- Rahman, H., & Setyowati, A. (2024). Indonesia's Maritime Posture in the Natuna Waters: Between Sovereignty and Diplomacy. *Journal of Maritime Policy*, 6(1), 65–84.
- Robert O. Keohane, Joseph S. Nye (1977) *Power and Interdependence*. Longman Classic in Political Science.
- Sari, D. P., & Nurmandi, A. (2023). ASEAN's Role in Enhancing Regional Security and Economic Stability through Defense Cooperation. *International Journal of Humanities, Education and Social Sciences*, 4(3), 1199–1209.
- Sari, N. M., & Chong, C. K. (2023). Navigating Multilateral Defense Engagements: The Role of ADMM and ADMM-Plus. *Asian Security Insights*, 10(2), 143–165.
- Sebastian, L. C., & Lanti, I. M. (2012). Perceptions and Misperceptions: Security Dilemma in Indonesia–Malaysia Relations. RSIS Working Paper No. 237
- Silver, C., & Woolf, N. H. (2018). *Qualitative Analysis Using NVivo: The Five-Level QDA Method*. Routledge
- Severino, R. C. (2006). *Southeast Asia in search of an ASEAN community: Insights from the former ASEAN Secretary-General*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Silverman, D. (2021). *Interpreting Qualitative Data* (6th ed.). SAGE
- Smith, S. (2001). Reflectivist and Constructivist Approaches to International Theory. In J. Baylis & S. Smith (Eds.), *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (pp. 224–250). Oxford University Press.
- Storey, I. (2020). Territorial Disputes in the South China Sea: Strategic Implications for ASEAN. *Contemporary Southeast Asia*, 45(1), 33–52.
- Thao, P. H. (2023). China's Gray Zone Tactics in the South China Sea: Implications for ASEAN. *Contemporary Southeast Asia*, 45(2), 175–195.



-
- Yahaya, M. F. b. M., & Yazid, M. N. b. M. (2020). General Border Committee Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) from the Perspective of Comprehensive Border Security Cooperation Model (CBSC Model). *International Journal of Social Science Research*, 2(1), 1–19.
- Yusof, S., & Sulaiman, M. A. (2023). ASEAN and the South China Sea Dispute: Challenges in Code of Conduct Negotiations. *Journal of Southeast Asian Studies*, 54(1), 89–107.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. McGraw-Hill.
- Wahyudi, A. (2021). Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Diplomasi Pertahanan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 9(1), 45–60
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*. McGraw-Hill
- Widiyanto, W., Anwar, S., & Risdhianto, A. (2024). Optimalisasi diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung Code of Conduct penyelesaian konflik di wilayah Laut China Selatan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 615–624. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.8299>
- Wijaya, D., & Puspitasari, R. (2023). Indonesia's Defense Diplomacy in ADMM-Plus: Strategies and Challenges. *Defense Studies Journal*, 11(3), 88–107.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge Study in International Relations.
- Wight, M. (1977). *Systems of States* (H. Bull, Ed.). Leicester University Press.